

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anshori, Abdul Ghofur (2016). *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Gadjah Mada University Press, Cetakan ketiga, Yogyakarta.
- Christiani, Anita (2014). *Hukum Perbankan. Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cetakan ke-4, Jalan Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M, dkk. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Cetakan ketigabelas, Yogyakarta.
- Hardanto, Sulad Sri (2006). *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu SP (2007). *Dasar-dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Idroes, Ferry N (2008). *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia (2013). *Memahami Bisnis Bank*. PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi ke – 1, Jakarta.
- Israhadi, Evita Isretno (2019). *Bahan Ajar Hukum Perbankan*. Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Jakarta.
- Kamsir (2008). *Manajemen Perbankan*. PT Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta.
- Kountur, Ronny (2005). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Penerbit PPM, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. PT Maha Karya Pustaka, Cetakan 1, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto (2010). *Sosologi Hukum, Perkembangan dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sembiring, Sentosa (2012). *Hukum Perbankan*. CV Mandar Maju, Edisi Revisi, Bandung.

- Sidharta, B. Arief (2018). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Silondae, Arus Akbar dan Ilyas, Wirawan B. (2013). *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sobana, Dadang Husen (2016). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. CV Pustaka Setia, Cetakan ke-1, Bandung.
- Soekanto, Soerjono (2014). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-23, Jakarta.
- Subekti (2010). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa, Cetakan kedua puluh tiga, Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. PT Pradnya Paramita, Edisi revisi cetakan ketigapuluhsatu, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW (2019). *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Universitas Gadjah Mada, Edisi Revisi, Yogyakarta.
- Yuhelson (2018). *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. Ideas Publishing, Kota Gorontalo.

Artikel Jurnal

- Amrillah, Muhammad Urfi, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia” *Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 4, Oktober 2020.
- Fathiddinovna, M.L. “The Role of Digital Banking in Modern Banking Ecosystem and Terms of Establishing in the Republic of Uzbekistan” *International Journal of Economics, Commerce and Management*, United Kingdom, ISSN 2348-0386, Vol. 8, Issue 2, February 2020 (<http://ijecm.co.uk/>).
- Gaib, N. Djuwita “Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia” *Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 11/Nov/2019.
- Guntara, I.M.A, dan Griadhi, N.M.A.Y. “Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di dalam Menyalurkan Kredit” *Journal Kertha Semaya*, E-ISSN: 2303-0569, Vol. 7, No. 8, 2019. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52209>.

Murdadi, Bambang “Urgensi Perubahan Undang-Undang Di Bidang Perbankan”
E-Journal Unimus, Vol. 8, No. 1, 2011 (<https://jurnal.unimus.ac.id/>).

Tarigan, H.A.A.B. dan Paulus, D.H. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2019.

Makalah/Pidato

Pramono, Nindyo. “Bahan Ajar Hukum Perbankan” (ppt), Universitas Gadjah Mada, 2021.

NITI Aayog. “Digital Banks, A Proposal for Licencing & Regulatory Regime for India” Discussion Paper, November 2021.

Internet

Christiawan, Rio (2021). “Tantangan Hukum Bank Digital”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-hukum-bank-digital-lt61308a5a9a319>, diakses 24 Januari 2022.

Fernando (2021). “Hati-hati! Ini Risiko Mengintai Bank Digital di Masa Depan”
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20211103113315-17-288645/hati-hati-ini-risiko-mengintai-bank-digital-di-masa-depan>, diakses 24 Januari 2022.

Januarita, Ratna (2022). “Mengenal Risiko Hukum”
<https://crmsindonesia.org/publications/mengenal-risiko-hukum/>, diakses 17 Mei 2022.

Jatmiko, Bambang Priyo (2018). “Laporan Keuangan Bukopin “Tersandung” Kasus Kartu Kredit, Ini Penjelasan Dirut”
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/03/070000026/laporan-keuangan-bukopin-tersandung-kasus-kartu-kredit-ini-penjelasan-dirut?page=all>, diakses 14 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022). “Bank” <https://kbbi.web.id/bank>, diakses 04 April 2022.

Mahadi (2020). “Fakta-fakta hilangnya duit puluhan miliar milik atlet e-sport Winda Earl di Maybank” <https://nasional.kontan.co.id/news/fakta-fakta-hilangnya-duit-puluhan-miliar-milik-atlet-e-sport-winda-earl-di-maybank>, diakses 27 Januari 2022.

Otoritas Jasa Keuangan (2021). “Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>, diakses 18 Oktober 2021.

Pangestimulyono, Resha Dwiayu (2020). “Legal Risk Management, Paradigma Baru Risiko Hukum” <https://kawanhukum.id/legal-risk-management-paradigma-baru-risiko-hukum-2/>, diakses 17 Mei 2022.

Romualdus, Sandy (2021). “Hati-hati Risiko Pasca Digitalisasi” <https://www.stabilitas.id/hati-hati-risiko-pasca-digitalisasi/>, diakses 29 Maret 2022.

Santoso (2020) “3 Terdakwa Pejabat Bank UOB Solo Divonis Bebas oleh Hakim PN Padahal Dituntut Jaksa Hukuman 5 Tahun” <https://solo.tribunnews.com/2020/08/19/3-terdakwa-pejabat-bank-uob-solo-divonis-bebas-oleh-hakim-pn-padaahal-dituntut-jaksa-hukuman-5-tahun>, diakses 27 Januari 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6701).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6486).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6235).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tanggal 2 September Tahun 2014).

Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (Matriks Parameter atau Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Bank).